

MEMPERKUAT KESADARAN BELA NEGARA DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF KEKINIAN

Putu Ronny Angga Mahendra

Prodi PPKn – FKIP Universitas Dwijendra

puturonny87@gmail.com

I Made Kartika

Prodi PPKn – FKIP Universitas Dwijendra

kartika@undwi.ac.id

Abstrak

Globalisasi merupakan peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh semua warga dunia termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju akan memberikan dampak globalisasi yang positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Pancasila sebagai kausa materialis merupakan produk warisan leluhur yang digali dari nilai budaya bangsa Indonesia. Isi dari warisan leluhur tersebut berupa nilai-nilai askiologis Pancasila yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku sehari-hari, baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat.

Bela Negara adalah suatu pengabdian semua warga Negara dalam setiap bentuknya, untuk kepentingan bangsa dan negaranya, yang mengacu pada kondisinya sebagai suatu Dharma Agama dan Dharma Negara. Sikap defensif ini akan membantu memperkuat kondisi bangsa yang besar ini yang bernama Indonesia bertahan di tengah terpaan arus kemajuan global yang beegitu cepat dan mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Indonesia akan tetap hidup dalam keberagaman, maju dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya, dan kuat di mata dunia. Hal ini akan dipererat dan diperkuat dengan nilai-nilai Pancasila kita sebagai pandangan dan pedoman hidup berkepribadian, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Abstract

Globalization is an opportunity and a challenge that must be faced by all citizens of the world, including Indonesia. The development of information and communication technology which is increasingly advanced will have positive and negative impacts of globalization on human life. Pancasila as a materialist cause is a product of ancestral heritage extracted from the cultural values of the Indonesian people. The contents of the ancestral heritage are in the form of the asciological values of Pancasila which are used as guidelines for the Indonesian people in their daily behavior, both as individuals and as members of society.

State Defense is a form of dedication of all citizens of the State in every form, for the benefit of the nation and state, which refers to its condition as a Dharma of Religion and Dharma of the State. This defensive attitude will help strengthen the condition of this great nation called Indonesia to survive in the midst of the current global progress that is so fast and includes all dimensions of human life. Indonesia will continue to live in diversity, advance in achieving its ideals of independence, and be strong in the eyes of the world. This will be strengthened and strengthened by our Pancasila values as a view and a way of life with a personality, community, nation and state.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sebagai kepulauan terbesar setelah Kanada yang terdiri dari 17.504 pulau, lebih kurang 300 suku bangsa, dan juga dengan keberagaman kebudayaan serta tata cara hidup masyarakat atau warga negaranya. Indonesia memiliki sejarah kelam yang pahit karena mengalami penjajahan oleh Belanda dan Jepang hampir 3,5 abad, karena mereka ingin menguasai Indonesia. Namun keinginan mereka sangat ditentang oleh para pahlawan, ulama, dan segenap anak bangsa pada saat itu. Oleh karena itu, akhirnya para pahlawan rela berkorban dan bertumpah darah berperang untuk mempertahankan wilayah bangsa Indonesia. Untuk menghargai para pejuang kita, hendaknya kita memiliki suatu kesadaran bela Negara dan nasionalisme yang sangat tinggi terhadap Negara yang telah menjadi tempat tinggal secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun saat ini kita tidak berperang secara fisik, akan tetapi kita menghadapi suatu musuh yang dari bangsa kita sendiri (intern) serta secara persaingan dunia global (ekstern).

Kehidupan masyarakat Indonesia kini telah bergeser dari lingkup lokal ke lingkup global. Perubahan pada era globalisasi, memberikan tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk terus membuka diri dan mengikuti arus perubahan, baik dalam keadaan siap ataupun tidak. Kewajiban yang harus dimiliki setiap warga Negara adalah membela Negara melakukan bela Negara agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat menjalankan fungsi dan tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kita menjalankan kewajiban ini, kita dapat membantu fungsi dan tujuan bangsa Indonesia ini.

Di era globalisasi ini Pancasila sangat diperlukan sebagai pembatas agar kita dapat memilih mana budaya yang dapat di terima di Indonesia dan yang bermanfaat dan mana yang seharusnya tidak di terapkan di Indonesia, semua itu juga didukung dengan kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa menyikapi era globalisasi secara bijak agar dapat bermanfaat dan membuat bangsa Indonesia semakin maju dan berkembang. Dewasa ini fenomena intoleransi, politik dengan menggunakan isu SARA, penyebaran informasi *hoax*, dan tindakan-tindakan provokasi melalui sosial media sangat menghiasi berita baik di media televisi lokal, nasional, maupun Internasional. Fenomena tersebut merupakan bagian dari dampak negatif di era globalisasi sekarang.

Pada konferensi “*Intercultural Leadership and Learning*”, dijelaskan oleh Panggabean, Muniarti, dan Tjitra (2015) bahwa berdasarkan hasil kajian mereka, manusia Indonesia memiliki tujuh kompetensi yang dapat digunakan untuk bersaing secara global. Tujuh kompetensi tersebut adalah: religiusitas, *guyub*, keberagaman, kepemimpinan fasilitatif, komunikasi tersirat, *nrima*, dan *generalist serta technical (functional) excellence*. Berangkat dari ide globalisasi dan nilai nasional, yaitu Pancasila, maka diajukan argumentasi bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara identitas global dan Pancasila pada semua nilai-nilainya. Dikarenakan nilai-nilai Pancasila dianggap mampu beradaptasi dengan perubahan jaman, maka kelanjutan dari argumentasi ini adalah ketika semakin tinggi penghayatan akan nilai-nilai Pancasila maka akan semakin tinggi pula identitas global seseorang. Kekuatan hal ini tentunya akan semakin berdampak dengan diperkuat sikap bela Negara oleh segenap komponen anak bangsa di Indonesia. Bela Negara adalah sebuah tindakan positif untuk menumbuhkan akan kesadaran bela Negara pada setiap warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk membela negaranya, dengan memperkuat jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka berdasarkan pandangan hidup Pancasila.

Pembahasan Bela Negara

Pengertian bela Negara menurut UU. RI. No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (2) huruf b yang berbunyi “yang dimaksud dengan pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangnya dan/ atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya”.

Dalam bentuk bela negara kita sebagai warga negara Indonesia yang dapat kita lakukan di tengah pandemi *covid-19* atau virus *corona* yang telah mengganggu dan mengancam kehidupan bangsa Indonesia adalah dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu untuk menjaga jarak dengan orang lain atau *social distancing*, rajin mencuci tangan dengan baik, memakan makanan yang sehat, dan tetap *stay home*. Sedangkan dalam dasar hukum Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Wujud dari usaha bela Negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara, kelangsungan hidup dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kondisi saat ini pelaksanaan bela Negara juga berlaku ketika masyarakat menggunakan media sosial (*netizen*) secara bijak perlu menjadi perhatian semua kalangan warga Negara. Seringkali konflik bermunculan karena hal ini yang dilakukan secara tidak benar, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah sebenarnya. Dalam jangka pendek, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di dunia maya, merupakan suatu langkah yang harus dilakukan. Akan tetapi hal ini menjadi tidak efektif bila masyarakat masih rendah pemahaman dunia digital. Kewajiban mengedukasi masyarakat terkait penggunaan sosial media, sejatinya merupakan tanggung jawab banyak pihak. Tidak hanya keluarga, sekolah, ataupun lingkungan. Di masyarakat baik dalam kehidupan riil maupun di dunia maya, gerakan literasi digital, dan membentuk komunitas menangkal berita bohong (*hoax*) atau berita palsu. Meski demikian, pekerjaan tersebut tentu melelahkan di tengah minimnya masyarakat yang lebih mengutamakan sentimen dan egosentrisme.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai lembaga yang menginisiasi kegiatan Bela Negara dapat mengambil peran ini dengan cara memasukkan kurikulum mengenai literasi digital. Tujuannya adalah menciptakan generasi yang cinta tanah air, Negara dan Bangsa melalui pemanfaatan informasi dan sosial media secara tepat guna. Kemampuan memilah dan mengolah informasi mutlak diperlukan bagi generasi penerus bangsa ini.

Sosial Media dan Konflik Informasi

Sosial media menjadi suatu alat politik karena sebagai kanal media yang tergolong murah, menjangkau luas, serta tanpa hambatan batasan geografis. Penggunaan sosial media tidak hanya untuk mengkomunikasikan dan menangkap informasi, menganalisis dinamika sosial-politik, mengantisipasi tren ekonomi, akan tetapi dapat pula menggambarkan kejadian, realitas, model, mempengaruhi persepsi situasi, orang, dan pilihan seseorang. Oleh karenanya, sosial media dapat mempengaruhi pengambilan keputusan institusional, bisnis, tim, serta pembentukan pengembangan opini publik. Hal-hal ini dapat dijadikan sebagai pengganggu proses pengambilan keputusan lawan, melalui manipulasi informasi dan analisis. Secara tidak langsung juga dapat

mempengaruhi kelompok orang yaitu partai politi, serikat/kelompok, opini publik, yang mempengaruhi pilihan kepemimpinan suatu Negara.

Sebagian Negara menganggap sosial media sebagai suatu ancaman keamanan nasional, termasuk demokrasi, dan melakukan pemblokiran akses terhadap akses layanan sosial media. Namun sosial media tidak sepenuhnya salah, karena sosial media adalah alat. Sorotan publik pada kontribusi sosial media terhadap konflik dan polarisasi masyarakat pada perkembangan pesat media sosial. Efek yg disebut sebagai efek echo chamber, suatu efek yang merupakan metamorphosis, dimana gagasan, informasi, keyakinan, diperkuat oleh komunikasi dan pengulangan di dalam sistem yang didefinisikan. Akibatnya adalah homogenisasi informasi dari apa yang dianggap sependapat dan mewakili perasaan subyektifitas seseorang. Hal ini akan sangat berdampak ketika informasi yang disebarakan adalah informasi palsu, *hoaks*, dan sejenisnya.

Perlunya Aksiologis Pancasila Di Era Globalisasi

Globalisasi merupakan peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh semua warga dunia termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju akan memberikan dampak globalisasi yang positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Pancasila sebagai kausa materialis merupakan produk warisan leluhur yang digali dari nilai budaya bangsa Indonesia. Isi dari warisan leluhur tersebut berupa nilai-nilai askiologis Pancasila yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku sehari-hari, baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat.

Ancaman nyata yang ada didepan mata kita dewasa ini adalah munculnya gerakan-gerakan ekstremis, politik adu domba dengan menggunakan isu SARA, adu domba oleh pihak-pihak asing, penyebaran informasi *hoax*, dan tindakan-tindakan provokasi melalui sosial media. Tantangan tersebut dapat kita hadapi apabila kita dalam bertingkah laku dan bertutur kata berpedoman kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah tersusun secara hierarkis berhubungan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Notonagoro menjelaskan hakikat sila-sila Pancasila, antara lain di dalamnya terkandung makna adanya kesesuaian dengan hakikat manusia yang memiliki tabiat saleh, yaitu sifat-sifat keutamaan pribadi manusia yang relatif permanen melekat dalam pribadi manusia yang meliputi sifat-sifat sebagai berikut :

1. Watak penghati-hati/kebijaksanaan: berbuat sesuai dengan pertimbangan akal, rasa dan kehendak.
2. Watak keadilan: memberikan apa yang menjadi hak dirinya dan hak orang lain.
3. Watak kesederhanaan : tidak melampaui batas dalam hal kemewahan, kenikmatan dan rasa enak.
4. Watak keteguhan: tidak melampaui batas dalam hal menghindari diri dari: duka dan hal yang enak. Sebagai penyeimbang watak kesederhanaan

Dari pendapat di atas bahwa sifat-sifat dan tabiat saleh tersebut sebagai nilai moral kepribadian bangsa Indonesia. Dalam Era globalisasi ukuran/standar nilai sosial budaya masyarakat global ikut mempengaruhi eksistensi kepribadian bangsa pada umumnya dan khususnya bagi bangsa Indonesia. Mengaktualisasikan Pancasila di era globalisasi adalah dengan cara penggalian kembali nilai-nilai luhur Pancasila dengan mempertimbangkan rasionalitas dan aktualisasinya dalam mengatasi masalah-masalah kekinian. Pancasila bukan hanya sebuah rumusan aturan/norma yang terbentuk secara instan tanpa memiliki sumber yang kuat, melainkan sebaliknya, bahwa Pancasila adalah rumusan dasar negara Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai moral kepribadian bangsa Indonesia, baik nilai moral agama, sosial dan budaya yang telah mengakar dan melekat bersama eksistensi bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, kebutuhan bangsa kita untuk menjabarkan rumusan-rumusan nilai dan norma, merevitalisasi, melaksanakan, memasyarakatkan, mendidik dan bahkan membudayakan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merupakan tugas dan tanggungjawab bersama baik masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah tidak boleh melepaskan beban tanggungjawab dengan hanya memberikan bantuan dan dukungan kepada lembaga legislatif atau pun lembaga yudikatif untuk memasyarakatkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945. Pemerintah harus tampil dengan tanggung jawabnya sendiri melalui tujuan pembangunan nasional yang bersumber pada hakikat kodrat manusia mono pluralis yang merupakan esensi dari Pancasila.

Bangsa Indonesia melaksanakan reformasi, pada prinsipnya merupakan upaya untuk memperbaiki negara yang pada gilirannya yang jauh lebih penting adalah tercapainya tingkat martabat manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, reformasi juga harus mendasarkan pada suatu paradigma yang jelas, dan dalam masalah ini paradigma yang harus diletakkan sebagai basis segala agenda reformasi adalah dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Hal ini bukan merupakan suatu keharusan politik melainkan suatu keharusan logis, sebab jikalau reformasi itu menyangkut masalah-masalah fundamental negara yang terkandung dalam *staatsfundamentalnorm* maka hal itu sudah menyimpang dari makna dan pengertian reformasi, yaitu suatu revolusi.

Kesadaran Bela Negara dan Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Pandemi Covid-19

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pandemic* adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau bahkan benua, dan umumnya menjangkit banyak orang. Sementara, epidemi merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di area tertentu. Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit, melainkan hanya tingkat penyebarannya saja. Dalam kasus saat ini, *covid-19* menjadi pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona. Pandemi *covid-19* dalam kesadaran bela Negara adalah upaya kita untuk mempertahankan Negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia yang berdasarkan cinta tanah air. Kesadaran negara juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri masyarakat Indonesia. Upaya bela Negara selain sebuah kewajiban dasar juga suatu kehormatan bagi warga Negara yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada Negara dan bangsa. Kesadaran bela Negara itu hakikatnya kesediaan berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela Negara.

Usaha pembelaan Negara bertumpu ada kesadaran setiap warga Negara akan hak dan kewajibannya. Kesadarannya demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan Negara. Proses motivasi untuk membela Negara dan Bangsa akan berhasil jika setiap Warga Negara memahami keunggulan dan kelebihan Negara dan bangsanya. Disamping itu setiap warga Negara hendaknya juga memahami kemungkinan segala ancaman terhadap eksistensi bangsa dan Negara Indonesia. Kesadaran bela Negara itu ditanamkan tidak hanya para TNI atau Polri, akan tetapi kepada setiap warga Negara yang sama memiliki hak dan kewajiban untuk membela Negara dan rela berkorban untuk Negara. Menumbuhkan kesadaran bela Negara memerlukan proses motivasi dan latihan yang baik, dengan kita memberikan motivasi secara perilaku yang lembut. Saat ini, kita di rumah saja adalah termasuk kesadaran bela negara. Dimana kita mematuhi kebijakan Pemerintah untuk tetap di rumah agar persebaran *covid-19* tidak tersebar dengan

cepat. Aktualisasi kesadaran bela Negara kita yang berbeda dengan para petugas medis yang bekerja siang dan malam tiada henti mengobati korban *covid-19*.

Aktualisasi kesadaran bela negara juga bukan di rumah saja, akan tetapi kita tetap melakukan aktivitas yang produktif di rumah. Dengan begitu sesuai dengan beberapa kebijakan pemerintah diantaranya: bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah akan tetapi jika kondisi wilayahnya masih memungkinkan untuk beribadah di masjid atau musolah diperbolehkan oleh para ulama, serta untuk menjaga jarak dengan orang lain minimal satu meter tu *social distancing*, rajin mencuci tangan, makan makanan yang sehat, selalu berolahraga, serta tidak kontak langsung dengan orang yang menderita *covid-19*. Namun, ada beberapa pihak yang menggunakan kesempatan seperti ini untuk berlibur dengan keluarga, ini termasuk pelanggaran dan tidak memiliki kesadaran dalam bela negara. Untuk itu kita sebagai rakyat Indonesia membantu pemerintah memutuskan mata rantai pandemi *covid-19* ini.

Nilai-nilai kegotongroyongan, nilai persaudaraan, saling membantu yang menjadi penciri besar bangsa kita dengan Ke-Pancasilaannya akan mampu membawa keoptimisan bangsa kita bahwa Indonesia sebagai bangsa pemenang, termasuk dalam menghadapi pandemi *covid-19* saat ini dan memasuki masa pasca pandemi ketika kita menyongsong fase *new normal*. Tantangan yang kita hadapi memang tidak mudah, bahkan tahun depan situasi yang sulit masih akan kita hadapi, situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras agar kita mampu melewati masa sulit tersebut. Pancasila saat ini hadir sebagai suatu roh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama serta bersatu. Pandemi *covid-19* merupakan kewajiban bersama seluruh bangsa Indonesia agar mampu mengembalikan kondisi Negara.

Penerapan nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu dengan cepat mengatasi pandemi *covid-19* ini, seperti pada sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kandungan nilai religius sebagai fondasi dalam kekuatan spiritualitas masyarakat, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini adalah satu fondasi terbesar dalam semua aspek kehidupan. Situasi saat ini akan semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan kita, berdoa dan berserah diri kepada-Nya dan memohon kondisi ini cepat berakhir. Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab memiliki nilai bahwa setiap orang berkewajiban memperlakukan satu sama lain secara sama berdasar etika, dengan memandang manusia secara utuh dengan rasa memanusiakan manusia. Hal ini akan membentuk nilai sikap tengang rasa, tolong menolong dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memiliki nilai untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia sekalipun berbeda-beda, dengan konsepsi gotong royong dalam menghadapi situasi saat ini. Pandemi ini akan kita lawan dengan kita bersatu sesuai dengan ketentuan dan edaran pemerintah, salah satunya jaga jarak dan berdiam diri di rumah. Sila ke empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah mengajarkan kita untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penanganan *covid-19* sebagai upaya *preventif* dari pemerintah. Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang memaknai bahwa Negara harus hadir dalam situasi saat ini secara adil bagi rakyatnya. Diperlukannya sinergitas, baik kerjasama antar masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah, sehingga akan semakin memperkuat kondisi kita sebagai bangsa yang besar.

Kesimpulan

Kesadaran bela negara adalah upaya kita untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia yang berdasarkan cinta tanah air. Kesadaran negara juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri

masyarakat Indonesia. Upaya bela negara selain sebuah kewajiban dasar juga suatu kehormatan bagi warga negara yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Bentuk kesadaran bela negara dengan cara selalu menjaga kebersihan, menjaga imunitas tubuh agar tetap stabil, selalu mencuci tangan setelah beraktivitas, dan memakan makanan yang sehat.

Daftar Pustaka

- Ardi Putri, Maharani & Eko Meinarno. *Relevankah Pancasila dan Globalisasi? Mengungkap Hubungan Pancasila dan Identitas Global*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. JIPPK, Vol.3 No.1 Juni 2018 hal 74-80.
- Depertemen Pendidikan Nasional.2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartika, I Made & Mahendra, Putu Ronny Angga. *Tri Hita Karana Sebagai Landasan Mewujudkan Kepemimpinan Pancasila*. Universitas Dwijendra Denpasar : Prosiding Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora – InoBali 2019 hal 222 – 228.
- Mahendra, Putu Ronny Angga. *Pembelajaran PPKn Dalam Resonansi Kebangsaan dan Globalisasi*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mahendra, Putu Ronny Angga. *Civic Culture Ngayah Dalam Pembelajaran PPKn*. AP3KnI Jateng: Jurnal PPKn Vol. 6 No. 1 Januari 2018.
- Mahipal. 2011. *Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan*. Jurnal Pedagoiga FKIP-Unpak, Maret 2011, halaman 13..
- Sapriya, dkk. 2014.*Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*.Lab. Pendidikan Kewarganegaraan UPI, Bandung.
- Winarno. 2012. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta. PT Bumi Aksara